

Pendapatan Retribusi Daerah- Dishub Parepare Turunkan Target Retribusi Parkir Jadi Rp 1,5 M dari Rp 1,9 M



Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Parepare, Aryun Handayana. Foto: (Muhclis Abduh/detikSulsel)

Sumber gambar:

<https://www.detik.com/sulsel/parepare/d-7420896/dishub-parepare-turunkan-target-retribusi-parkir-jadi-rp-1-5-m-dari-rp-1-9-m>

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengaku realistis dengan target retribusi parkir tahun ini. Dishub hanya menargetkan capaian retribusi parkir sebesar 70 persen atau Rp 1,5 miliar dari target Rp 1,9 miliar.

"Kami maksimal finish di 70 persen atau Rp 1,5 miliar dari target Rp 1,9 miliar," ujar Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Parepare, Aryun Handayana saat ditemui **detikSulsel**, Rabu (3/7/2024).

Aryun mengungkapkan, target tersebut disesuaikan lantaran pihaknya masih akan melakukan sosialisasi agar pembayaran retribusi parkir bisa tertib terlebih dahulu. Dia khawatir terjadi riak-riak jika memaksakan retribusi parkir mencapai target 100 persen.

"Kita mau fokus ke sosialisasi dulu karena kalau kami paksakan juga jangan sampai banyak terjadi riak-riak sementara kita mau jaga agar bisa tetap tertib dulu," katanya.

ia mengakui pihaknya juga terus berupaya untuk membuat terobosan melalui kerja sama dengan pihak ketiga untuk pengelolaan parkir. Hal tersebut sesuai dengan rekomendasi dari DPRD Parepare.

"Pemkot sementara susun regulasi untuk dibuatkan Perwali untuk pengelolaan parkir oleh pihak ketiga karena itu rekomendasi dari DPRD Parepare," jelasnya.

Lebih lanjut, Aryun mengungkapkan, hingga semester 1 tahun 2024, capaian retribusi parkir sudah mencapai 31 persen atau Rp 611 juta dari target Rp 1,9 miliar tersebut. Dia menyebut capaian ini lebih tinggi ketimbang semester 1 tahun 2023 lalu.

"Untuk semester 1 ini kita capai 31 persen dari target atau sekitar Rp 611 juta. Tahun lalu pada periode yang sama hanya sekitar Rp 400 juta. Jadi memang ada kenaikan capaian kalau mau dibandingkan," terangnya.

Adapun dalam hal tersebut, Siap-siap! Iuran sampah di Kota [Makassar](#) bakal naik.

Pemerintah Kota [Makassar](#) akan memaksimalkan pendapatan yang bersumber dari retribusi sampah.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup, jumlah pendapatan retribusi sampah setiap tahunnya diangka Rp35 miliar.

Hal ini tak sebanding dengan subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani masalah persampahan.

Plt Kepala DLH Kota Makassar Ferdi Mochtar mengatakan subsidi setiap tahunnya untuk penanganan sampah mencapai Rp200 miliar.

Itu mencakup pengadaan hingga pemeliharaan infrastruktur sampah atau transportasi dan alat angkut sampah.

Anggaran Rp200 miliar itu juga sudah termasuk biaya untuk membayar insentif petugas sampah.

Karenanya, Pemkot [Makassar](#) akan melakukan penyesuaian terhadap retribusi sampah.

Sebab, nilai yang ada sekarang ini dianggap sudah tidak relevan.

"Sekarang kota sedang godok perwalinya. Sudah di bagian hukum, dan kita akan bahas teknis bersama tim ahli hukum Pemerintah [Makassar](#)," ucap [Ferdie Mochtar](#), Selasa (25/6/2024).

Kata Ferdi, penyesuaian ini harus dilaksanakan sebab merupakan turunan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan pada 5 Januari lalu.

Rancangan peraturan wali kota tersebut kata Ferdi juga telah dipaparkan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Perwali ini kami sudah presentasikan di Kemendagri, karena ada keterkaitan dengan retribusi dan angka-angka, itu sudah kita diskusikan sampai di mana dapatkan turunan-turunan, mulai misalnya di tingkat rumah tangga miskin, menengah ke atas yang masing-masing berbeda tarif," paparnya.

Ferdi mencontohkan, retribusi sampah untuk keluarga miskin nilainya Rp25 ribu.

Hal tersebut disesuaikan dengan tarif listriknya, kalau misalnya Rp 900 watt ke bawah, nilainya Rp25 ribu per bulan.

Berdasarkan perwali yang berlaku sebelumnya, tagihan sampah untuk keluarga miskin Rp16 ribu per bulan.

"Jadi ada kenaikan kurang lebih sekitar Rp9.000, tapi kita tetap melihat perkembangan ditingkat masyarakat, makanya nanti ada perbaikan-perbaikan, tentunya kita akan rapatkan dan diskusikan kembali," ulasnya.

"Tapi kita juga melihat seberapa besar kontribusi pelayanan kita terhadap penanganan persampahan yang selama ini banyak di subsidi oleh pemerintah," sambungnya.

Terpisah, Wali Kota [Makassar Danny Pomanto](#) menyampaikan akan melakukan efisiensi terhadap seluruh armada sampah.

Danny merencanakan pembelian armada sampah listrik menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2024.

Danny berharap dengan menggunakan armada listrik, tidak ada lagi kebocoran anggaran operasional, khususnya dalam pembelian bahan bakar minyak.

Sehingga tidak ada lagi alasan tidak mengoperasikan armada karena tidak ada BBM.

Selain itu, untuk menghindari kebocoran iuran atau retribusi sampah, pembayarannya akan menggunakan aplikasi Pakinta'.

"Jadi tidak adami lagi yang bisa disalahgunakan. Langsung dibayar pakai Qris menggunakan

Sumber Berita:

1. <https://www.detik.com/sulsel/parepare/d-7420896/dishub-parepare-turunkan-target-retribusi-parkir-jadi-rp-1-5-m-dari-rp-1-9-m>
2. <https://makassar.tribunnews.com/2024/06/25/siap-siap-iuran-sampah-di-makassar-bakal-naik-warga-miskin-rp25-ribu-per-bulan>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

